

The page features three large, light blue, 3D-style circles of varying sizes. Two thin blue lines cross the page diagonally, one from the top-left to the bottom-right, and another from the top-right to the bottom-left, intersecting at the center. The text is positioned in the upper-left and lower-left areas.

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEHTIMUR
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH
TIMUR TAHUN 2023**

RENCANA KERJA (RENJA)

[Type the docu

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023-2026 dan juga mempertimbangkan hasil hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan bagian dari dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dan menjadi pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

Pada akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Timur dan memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Idi, September 2023


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
SAHMINAN, SKM, M. Kes
NIP. : 19710416 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
.....	
DAFTAR ISI	ii
.....	
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
1. LATAR BELAKANG	1
1	
1. LANDASAN HUKUM	3
2	
1. MAKSUD DAN TUJUAN	4
3	
1. SISTEMATIKA PENULISAN	4
4	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019	5
.....	
2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	5
1 TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	
.....	
2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT	21
2	
2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN	23
3 FUNGSI DINAS KESEHATAN	
.....	
2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	24
4	
2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DANKEGIATAN	35
5	
BAB TUJUAN DAN SASARAN	36
III	
.....	
3. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	36
1	
3. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	37
2	
3. PROGRAM DAN KEGIATAN	8
3	

BAB	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
IV	
BAB	PENUTUP	55
V	
	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak - hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Di Kabupaten Dinas Kesehatan merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Timuryang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kabupaten Aceh Timur di Bidang Kesehatan. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan, namun demikian masih ada permasalahan di bidang kesehatan yaitu masih adanya potensi kematian ibu, bayi, balita, serta gizi buruk. Tingginya angka penyakit menular potensial wabah terutama demam berdarah dan penyakit akibat gaya hidup (misalnya penyakit degeneratif) juga merupakan permasalahan ganda epidemiologi yang tetap menjadi tantangan pembangunan kesehatan. Selain itu, semakin berkembangnya pelayanan kesehatan swasta (tradisional dan modern) yang belum terkoordinir melalui sistem yang baik merupakan tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kotaldi.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistematis upaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2023, disusunlah Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, penyiapan data dan informasi pendukung. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam prosesnya berpedoman pada Renstra dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perangkat Daerah. Selain itu melakukan pengkajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Selanjutnya dilakukan perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah adalah pengesahan Renja oleh Kepala Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, mempunyai kewajiban menyusun rencana kerja bidang kesehatan untuk mendukung perencanaan daerah tahunan atau lebih dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai target (indikator) yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Timur Tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Renja Perangkat Daerah menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur juga memuat usulan dari hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program dan kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun

2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dan akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);]
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
 24. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 5);
 25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
 26. Qanun Aceh Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
 27. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2023 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2023) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan merupakan proses sistematis yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. Pengukuran Kinerja dilakukan pada Indikator tujuan, sasaran yang telah direncanakan dalam RENSTRA maupun RENJA, kemudian dibandingkan dengan realisasi dari pelaksanaan Program dalam rangka mencapai target indikator sasaran tersebut. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur meliputi evaluasi Perjanjian kinerja dengan kriteria Capaian Sangat baik, Baik, cukup dan kurang dan Evaluasi terhadap realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021 telah dilakukan dengan hasil bahwa sebagian besar sangat baik bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja indikator kinerja sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target		Realisasi		% capaian
			volume	Satuan	Volume	satuan	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	%	99	%	99
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan	100	%	100	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam mengikuti Bimtek dan sosialisasi	Persentase sumber daya aparatur dalam mengikuti Bimtek dan sosialisasi	100	%	100	%	100
4	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai ASN	15	%	15	%	100

5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase ketesediaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	100	%	100
6	Meningkatnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat serta Perbekalan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan Vaksin serta perbekalan kesehatan	90	%	99	%	110
7	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular	Persentase penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	45	%	45
		Persentase penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	82,7	%	82,7
8	Meningkatnya Sanitasi Dasar, Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat	Persentase Desa melaksanakan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	60	%	100	%	166,7
		Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Germas	35	%	50	%	143
9	Meningkatkan satus Balita dengan Gizi Buruk	Persentase Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100	%	100	%	100
		Prevalensi Stunting Pendek dan Sangat Pendek pada balita	21,1	%	13,8	%	134,5
10	Menurunkan angka kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100	%	34,5	%	34,5
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100	%	65,3	%	65,3
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	100	%	100	%	100
11	Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi	100	%	100	%	100
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	%	67,3	%	67,3
		Persentase Penduduk usia diatas 60 keatas mendapat pelayanan kesehatan usia Lanjut sesuai standar	100	%	72	%	72
		Persentase orang 15-59 tahun yng mendapatkan skrining kesehatan reproduksi sesuai standar	100	%	10,5	%	10,5

12	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Puskesmas yang melaporkan dokumen sistem Informasi Kesehatan	80	%	100	%	125
13	Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	%	100	%	100
14	Meningkatnya Puskesmas, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan Puskesmas pembantu	Ratio Puskesmas Persatuan Penduduk	6,08	Per 100.000 Penduduk	6,08	Per 100.000 Penduduk	100
		Ratio Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk	14,9	Per 100.000 Penduduk	14,9	Per 100.000 Penduduk	100
15	Menurunkan angka kematian (AKI) Ibu dan Bayi (AKB)	Angka kematian Ibu (AKI)	217	Per 100.000KH	193,7	Per 100.000KH	110
		Angka Kemataian Bayi (AKB)	19,5	Per 1000 KH	1,6	Per 100.000KH	191,7
		Angka kematian Bayi Baru Lahir (0-28 hari)	12,2	Per 1000 KH	9,7	Per 100.000KH	120,4
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	%	89,2	%	89,2
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	%	81,5	%	81,5
		Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	%	88,9	%	88,9
16	Meningkatnya Pelayanan kesehatan Jemaah haji	Jumlah calon jemaah haji yg mendapat pelayanan Kesehatan	100	%	100	%	100
17	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	%	90,6	%	90,6

Adapun analisis Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2021 sebagai berikut

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun Indikator Kinerja:

- 1.1 Presentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun Indikator Kinerja:

2.1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur dalam mengikuti Bimtek dan Sosialisasi.

Adapun Indikator Kinerja:

3.1 Persentase sumber daya aparatur dalam mengikuti Bimtek dan sosialisasi dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Adapun Indikator Kinerja:

4.1 Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai ASN dengan Target 15% dan Realisasi 15% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun Indikator Kinerja:

5.1 Persentase ketesediaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat serta Perbekalan

Adapun Indikator Kinerja:

6.1 Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan Vaksin serta perbekalan kesehatan dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 7 :

Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular

Adapun Indikator Kinerja:

7.1 Persentase penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 45% dengan Persentase Capaian 45% dengan Kategori Kurang

7.2 Persentase penderita diabetes mellitus usia \geq 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 82,7% dengan Persentase Capaian 82,7% dengan Sangat Baik

Sasaran Strategis 8 :

Meningkatnya Sanitasi Dasar, Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Sehat di Masyarakat

Adapun Indikator Kinerja:

8.1 Persentase Desa melaksanakan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan Target 60% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 166,7% dengan Kategori Sangat baik

8.2 Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Germas dengan Target 35% dan Realisasi 50% dengan Persentase Capaian 143% dengan Sangat Baik

Sasaran Strategis 9 :

Meningkatkan satus Balita dengan Gizi Buruk

Adapun Indikator Kinerja:

9.1 Persentase Jumlah Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat baik

9.2 Prevalensi Stunting Pendek dan Sangat Pendek pada balita dengan Target 21,1% dan Realisasi 13,8% dengan Persentase Capaian 134,5% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 10 :

Menurunkan angka kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular

Adapun Indikator Kinerja:

10.1 Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 34,5% dengan Persentase Capaian 34,5% dengan Kategori Kurang

10.2 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) dengan Target 100% dan Realisasi 65,3% dengan Persentase Capaian 65,3% dengan Kategori Cukup

10.3 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 11 :

Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan

Adapun Indikator Kinerja:

- 11.1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang ter-akreditasi dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik
- 11.2 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 67,3% dengan Persentase Capaian 67,3% dengan Kategori baik
- 11.3 Persentase Penduduk usia diatas 60 keatas mendapat pelayanan kesehatan usia Lanjut sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 72% dengan Persentase Capaian 72% dengan Kategori Baik
- 11.4 Persentase orang 15-59 tahun yng mendapatkan skrening kesehatan reproduksi sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 10,5% dengan Persentase Capaian 10,5% dengan Kategori Kurang

Sasaran Strategis 12 :

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik

Adapun Indikator Kinerja:

- 12.1 Persentase Puskesmas yang melaporkan dokumen sistem Informasi Kesehatan dengan Target 80% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 125% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 13 :

Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan dasar masyarakat miskin

Adapun Indikator Kinerja:

- 13.1 Persentase pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 14 :

Meningkatnya Puskesmas, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Puskesmas dan Puskesmas pembantu

Adapun Indikator Kinerja:

- 14.1 Ratio Puskesmas Persatuan Penduduk dengan Target 6,08 Per 100.000 Penduduk dan Realisasi 6,08 Per 100.000 Penduduk dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik
- 14.2 Ratio Puskesmas Pembantu Persatuan Penduduk dengan Target 14,9 Per 100.000 Penduduk dan Realisasi 14,9 Per 100.000 Penduduk dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 15 :

Menurunkan angka kematian (AKI) Ibu dan Bayi (AKB)

Adapun Indikator Kinerja:

- 15.1 Angka kematian Ibu (AKI) dengan Target 217 Per 100.000 Penduduk dan Realisasi 6,08 Per 100.000 Penduduk dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik
- 15.2 Angka Kemataian Bayi (AKB) dengan Target 19,5 Per 1000 KH dan Realisasi 1,6 Per 1000 KH dengan Persentase Capaian 191,7% dengan Kategori Sangat Baik

15.3 Angka kematian Bayi Baru Lahir (0-28 hari) dengan Target 12,2 Per 1000 KH dan Realisasi 9,7 Per 1000 KH dengan Persentase Capaian 120,4% dengan Kategori Sangat Baik

15.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan Target 100% dan Realisasi 89,2% dengan Persentase Capaian 89,2% dengan Kategori Sangat Baik

15.5 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan Target 100% dan Realisasi 81,5% dengan Persentase Capaian 81,5% dengan Kategori Baik

15.6 Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan Target 100% dan Realisasi 88,9% dengan Persentase Capaian 88,9% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 16 :

Meningkatnya Pelayanan kesehatan Jemaah haji

Adapun Indikator Kinerja:

16.1 Jumlah calon jamaah haji yg mendapat pelayanan kesehatan dengan Target 100% dan Realisasi 100% dengan Persentase Capaian 100% dengan Kategori Sangat Baik

Sasaran Strategis 17 :

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa

Adapun Indikator Kinerja:

17.1 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan Target 100% dan Realisasi 90,6% dengan Persentase Capaian 90,6% dengan Kategori Sangat Baik

Evaluasi terhadap realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Terdapat 21 indikator kinerja Kegiatan dan 71 indikator Subkegiatan. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table berikut:

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	99%	99%	
1.1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	

1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1639 Orang	1639 Orang	100%	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah petugas/aparatur yang mendapatkan jasa keuangan per tahun	18 Orang	18 Orang	100%	
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya penataan ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur	1639 Pegawai / ASN	1639 Pegawai / ASN	100%	
1.3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1639 Pegawai / ASN	1639 Pegawai / ASN	100%	
1.3.1	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah PNS yang pindah tugas kerana pengangkatan/promosi dalam jabatan eselon, kepala puskesmas/kepala tata usaha puskesmas	30 Pegawai / ASN	23 Pegawai / ASN	77%	
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Pegawai / ASN	30 Pegawai / ASN	100%	
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta	54 Pegawai / ASN	54 Pegawai / ASN	100%	
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.4.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	611 Eksemplar	611 Eksemplar	100%	

1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas ke luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	100%	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	2 Unit	2 Unit	100%	
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kelancaran tugas-tugas kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464 Orang	464 Orang	100%	
1,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	
1.7.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	211 Unit	200 Unit	95%	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	99%	99%	
2,1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	99%	99%	
2.1.1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya rumah dinas bagi tenaga kesehatan	1 Unit	1 Unit	100%	
2.1.2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Gedung/Ruangan Puskesmas yang di Bangun	1 Unit	1 Unit	100%	
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	27 Unit	27 Unit	100%	

2.1.4	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Paket	6 Paket	86%	
2.1.5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	364 Paket	364 Paket	100%	
2.1.6	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat yang di kalibrasi	554 Alat	554 Alat	100%	
2.1.7	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat dan Vaksin	148 Jenis	148 Jenis	100%	
2.1.8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	49 Jenis	49 Jenis	100%	
2.1.9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	100%	
2.1.10	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi Obat, BMHP dan Vaksin ke Puskesmas	324 kali	324 kali	100%	
2,2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	80%			
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	10293	8389	81,5%	
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	9825	8759	89,2%	
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	9357	8315	88,9%	
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita usia yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	45718	34474	75,4%	
2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	80818	54420	67,3%	
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	cakupan pelayanan kesehatan pada usia Produktif sesuai standar	286055	29956	10,5%	

2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrinning Kesehatan sesuai standart	31653	22777	72,0%	
2.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84540	38084	45,0%	
2.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4883	4039	82,7%	
2.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	929	842	90,6%	
2.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	6.010	2.073	34,5%	
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	12338	8059	65,3%	
2.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	54 Kali	54 Kali	100,0%	
2.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100,0%	
2.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
2.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Gampong yang melaksanakan STBM	513 Gampong	513 Gampong	100%	
2.2.16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah tenaga promkes yang terlatih	27 Orang	27 Orang	100%	
2.2.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Sasaran Vaksinasi	312063 orang	223829 orang	72%	
2.2.18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Pertemuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	30 Peserta	30 Peserta	100%	

2.2.19	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%	
2.2.20	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	150 kasus	14 Kasus	9%	
2.2.21	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	29 Kali	29 Kali	100%	
2.2.22	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100%	
2.2.23	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	120 Kali	120 Kali	100%	
2.2.24	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Alat SI PSC 119	1 Paket	1 Paket	100%	
2,3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	20 Puskesmas	20 Puskesmas	100%	
2.3.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
2.3.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA Generik	54 Peserta	54 Peserta	100%	
2.3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Perangkat SIKDA GENERIK (DID)	10 Paket	10 Paket	100%	
2,4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Puskesmas	3 Puskesmas	100%	
2.4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen UKL / UPL (Izin Operasional) Puskesmas	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
2.4.2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 Rumah Sakit	3 Rumah Sakit	100%	

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
3,1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
3,2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
3.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	100%	
3.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
3,3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	100%	
3.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	27 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit	100%	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan	100%	100%	100%	
4,1	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61 Kegiatan	61 Kegiatan	100%	
4.1.1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin	61	61	100%	

4,2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
4,3	Penerbitan Sertifikat Produksi dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan	188 Kali	154 Kali	82%	
4.3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	188 Kali	154 Kali	82%	
4,5	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan	1 Keg	1 Keg	100%	
4.5.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20	15	75%	
4,6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	17 Sampel	15 Sampel	88%	
4.6.1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman	17 Sampel	15 Sampel	88%	

5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	
5,1	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
5.1.2	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melakukan intervensi promosi kesehatan di semua tatanan	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
5,2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	
5.2.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan PHBS	27 Puskesmas	27 Puskesmas	100%	

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya Indikator kinerja:
 - a. Tidak Ada kesesuaian data antara data riil dengan sasaran BPS sehingga target yang ditetapkan tidak dapat dicapai.
 - b. Masih banyak desa yang tidak ada bidan Desa, Sehingga tidak terlayani dan tidak ada data
 - c. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
 - d. Ada Pelayanan yang dilayani oleh pihak swasta (BPM, Klinik dan lain-lan) tidak memberikan laporan ke Puskesmas dan Dinkes.
 - e. Kurangnya Minat dari masyarakat untuk datang ke Posbindu
 - f. Pelaksanaan ANC terpadu yang belum dapat berjalan optimal dikarenakan belum semua fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM yang melaksanakan ANC terpadu selain Puskesmas
 - g. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
 - h. Sistem Pencacatan dan Pelaporan yang tidak sesuai
 - i. Pelaksanaan Posyandu, Belum maksimal keterlibatan pihak terkait, Dalam mempersiapkan dan pelaksanaannya sehingga kunjungan balita tidak tercapai target
 - j. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini merupakan penyebab kematian ibu melahirkan dan dapat menambah jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Aceh Timur.
 - k. Kurangnya koordinasi dan kerja sama dgn lintas sektor dan lintas profesi dalam penjangkaran dan penanganan kasus TBC
 Masih banyak kasus TBC yang belum ternotifikasi di klinik dan DPM di karenakan keterbatasan SDM dan juga sarana dan prasarana dalam pelaporan kasus TBC di Aplikasi SITB
 - i. Masih kurangnya penemuan kasus secara aktif di faskes
 - j. Belum maksimalnya koordinasi lintas program, penguatan di lintas sector, juga belum maksimal dalam dalam Tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat (TKPJM) Sehingga masih tingginya Stigma negative terhadap ODGJ dimasyarakat.
 - k. Belum maksimalnya koordinasi lintas program, penguatan di lintas sector, juga belum maksimal dalam kegiatan posbindu, sehingga masyarakat tidak merasa penting datang ke posbindu

2. Implikasi yang timbul terhadap capaian proram Renstra Perangkat Daerah:

Memperhatikan data diatas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan antara lain adalah:

- a. Dimungkinkan adanya peningkatan status gizi balita
 - b. Masih dimungkinkan terjadinya kematian ibu, bayi dan balita
 - c. Masih dimungkinkan adanya penurunan kekebalan bayi dan balita sehingga mudah sakit karena terjadi penolakan terhadap imunisasi.
 - d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan
 - e. Meningkatnya kunjungan ke pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) karena petugas, sarana dan prasarana Puskesmas semakin baik.
 - f. Adanya peningkatan kesembuhan bagi penderita TB
 - g. Adanya Peningkatan Kunjungan ke Pobindu PTM untuk memeriksa kesehatannya
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor factor penyebab:
- a. Memberikan Makanan Tambahan kepada Bumil KEK dan balita Gizi Kurang.
 - b. Membuat program peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan Gizi yang terintegrasi dengan program dan sektor terkait, Peningkatan kualitas ANC (ANC terpadu berkualitas) kelas ibu, dan Memperkuat jejaring rujukan dengan group WhatsApp
 - c. Melakukan penjangkaran kasus anemia & KEK (Kekurangan Energi Kronis) sejak remaja , calon pengantin dan WUS (wanita usia subur) dan Memberikan tablet tambah darah bagi remaja, calon pengantin dan WUS.
 - d. Implementasi ANC berkualitas atau ANC terpadu sehingga dapat mendeteksi adanya faktor resiko dan komplikasi kehamilan.
 - e. Berjalannya program suami siaga, pembinaan pada bidan praktek swasta serta menyiapkan buku KIA untuk semua ibu hamil sebagai penghubung bagi semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil, kader pendamping, serta keluarga/suami.
 - f. Meningkatkan sosialisasi Peraturan KABUPATEN ACEH TIMUR No 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan siaga
 - g. Adanya komitmen pemerintah tentang Universal Health Coverage (UHC).
 - h. Meningkatkan koordinasi dgn lintas sektor dan juga lintas profesi yg di kuatkan dgn pembentukan DPPM serta KOPI TB Aceh timur
 - i. Melakukan upaya jemput bola (penemuan secara aktif) dgn melakukan penjangkaran ke lapangan
- Data hasil capaian indikator sasaran dan program dan Kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Aceh Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan	fisik	keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12= 10/8	13=11/9	14	15	16=15/14
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			289.267.415.845				151.326.408.151		137.498.617.267					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	Rp 200.329.860.910			100%	Rp 115.292.884.186	99%	Rp 111.458.524.801	99 %	97%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	7 Sub	Rp 26.831.480			1 Dokumen	Rp 3.890.800	1 Dokumen	Rp 3.044.400	100 %	78%	1 Sub	1 Sub	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	Rp 12.500.000											

1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Rp 1.680.000											
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Rp 560.000											
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Rp 560.000											
1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	Rp 560.000											
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	Rp 8.971.480		1 Dokumen	Rp 3.890.800	1 Dokumen	Rp 3.044.400,00	78 %	78%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Peg/ASN	Rp 2.000.000											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Sub	Rp 124.642.525.362			100%	Rp 99.876.682.934	100%	Rp 97.715.574.978	100 %	98%	2 sub	Sub	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1691 Orang/bulan	Rp 124.628.945.362		1639 Orang/bulan	Rp 99.699.190.934	1639 Orang/bulan	Rp 97.573.782.978	98 %	98%	1634 orang	1634 orang	100%	
1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	Rp 3.600.000		18 Orang	Rp 177.492.000	18 Orang	Rp 141.792.000	80 %	80%	1Tahun	1Tahun	100%	

1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 500.000													
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 560.000													
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Rp 6.060.000													
1	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 300.000													
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp 2.560.000													
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Sub	Rp 3.980.000													
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1.000.000													
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Rp 560.000													
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 560.000													

1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 560.000											
1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 1.300.000											
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Sub	Rp 49.400.000		6 sub	Rp 18.635.900	6 sub	Rp 18.052.700	100 %	97%	1Sub	1 Tahun	100%	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Rp 6.000.000											
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1654 Dokumen	Rp 7.380.000		1639 Pegawai	Rp 2.648.300	1639 Pegawai	Rp 2.643.300	100 %	###	800 Dokumen	800 Dokumen	100%	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp 7.560.000											
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	Rp 7.560.000											
1	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	15 Orang	Rp 7.500.000		30 ASN	Rp 8.842.600	23 ASN	Rp 8.473.800	77 %	96%	33 ASN	33 ASN	100%	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Rp 5.840.000		30 ASN	Rp 3.045.000	30 ASN	Rp 2.932.200	96 %	96%	48 Orang	48 Orang	100%	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Rp 7.560.000		54 Pegawai/ASN	Rp 4.100.000	54 Pegawai/ASN	Rp 4.003.400,00	98 %	98%				

1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 Sub	Rp 1.519.582.653			8 sub	Rp 7.393.665.520	8 sub	Rp 6.087.924.348	100 %	82%	Sub	sub	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Rp 57.545.173			12 Bulan	Rp 32.101.000,00	12 Bulan	Rp 32.099.400,00	100 %	###	8 Paket	8 Paket	100%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Rp 78.239.380			12 Bulan	Rp 351.118.320	12 Bulan	Rp 308.481.600,00	88 %	88%	4 Paket	4 Paket	100%
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 55.000.000			12 Bulan	Rp 39.642.000	12 Bulan	Rp 27.932.400,00	70 %	70%			
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 679.840.000			12 Bulan	Rp 6.697.656.200	12 Bulan	Rp 5.465.222.700,00	82 %	82%	2 Paket	2 Paket	100%
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 325.758.100			12 Bulan	Rp 60.148.600	12 Bulan	Rp 58.681.800,00	98 %	98%	9 Paket	9 Paket	100%
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Rp 15.000.000			611 Eksemplar	Rp 2.999.400	611 Eksemplar	Rp 2.999.400,00	100 %	###	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Rp 1.000.000											
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	Rp 306.000.000			12 bulan	Rp 210.000.000	12 bulan	Rp 192.507.048	92 %	92%	180 Laporan	180 Laporan	100%
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 1.200.000											

1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Sub	Rp 4.642.161.952			7 Sub	Rp 1.180.024.900	1 Sub	Rp 1.169.212.000,00	99 %	99%	1 Sub	1 Sub	100%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp 1.163.167.960			2 Unit	Rp 1.180.024.900	2 Unit	Rp 1.169.212.000,00	99 %	99%	1 Unit	1 Unit	100%
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Rp 110.000.000											
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 250.000.000											
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 1.300.000.000											
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit/tahun	Rp 1.818.993.992											
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-											
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4 Sub	Rp 15.377.934.413			3 Sub	Rp 4.373.584.532	3 Sub	Rp 4.085.720.449	100 %	93%	Sub	Sub	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 8.000.000			1 Laporan	Rp 9.490.000	1 Laporan	Rp 6.990.000	100 %	74%	1 Laporan	1 Laporan	100%

1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 2.602.372.013			1 Laporan	Rp 843.999.932	2 Laporan	Rp 705.515.849,00	84 %	84%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 5.000.000									Laporan	Laporan	100%
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 12.762.562.400			1 Laporan	Rp 3.520.094.600	4 Laporan	Rp 3.373.214.600,00	96 %	96%	Laporan	Laporan	100%
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	6 Sub	Rp 2.079.445.050			4 sub	Rp 2.446.399.600	4 sub	Rp 2.378.995.926	100 %	97%	12 bulan	12 bulan	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 12.000.000											
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	Rp 795.424.050											
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Rp 35.000.000											
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 141.851.400			1 Unit	Rp 991.300.000	1 Unit	Rp 987.296.310,00	100 %	###			
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Rp 1.085.169.600			1 Unit	Rp 1.455.099.600	1 Unit	Rp 1.391.699.616,00	100 %	96%	122 unit	122 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 10.000.000											

1	Peningkatan Pelayanan BLUD		1 Sub	Rp 51.988.000.000											
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit	1 Unit kerja	Rp 51.988.000.000											
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minima (SPM) Bidang Kesehatan	4 Kegiatan	Rp 87.576.132.355			2 kegiatan	Rp 35.585.602.771	2 kegiatan	Rp 25.659.785.666	100 %	72%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 Sub	Rp 25.264.723.515			15 sub	Rp 16.907.702.261	15 sub	Rp 16.412.835.713	100 %	97%	2 Sub	2 Sub	100%
1	Pembangunan Puskesmas														
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Rp 852.587.731											
1	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							Rp 281.607.950	1 Unit	Rp 278.646.168,00	99 %	99%			
1	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Rp 300.000.000											

1	Pengembangan puskesmas							Rp 1.475.027.050	1 Unit	Rp 1.459.395.810	99 %	99%			
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	80 Unit	Rp 1.000.000.000											
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	Rp 378.852.766											
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	Rp 694.540.500		2 Unit	Rp 3.642.253.208	1 Unit	Rp 3.625.428.879,00	100 %	###		4 Unit	4 Unit	100%
1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Rp 141.813.934											
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	Rp 4.244.477.209		2 Unit	Rp 635.638.453	1 Unit	Rp 484.797.384,00	76 %	76%				
1															
1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 4.120.399.682		1 Unit	Rp 2.954.808.750	1 Unit	Rp 2.769.829.200,00	94 %	94%		18 Unit	18 Unit	100%
1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	600 Unit	Rp 100.000.000		600 Unit	Rp 195.000.000	1 Unit	Rp 168.799.100,00	87 %	87%				

1	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	Rp 8.514.584.780			1 Paket	Rp 3.887.000.000	1 Unit	Rp 3.834.468.554,00	99 %	99%	2 Paket	2 Paket	100%
1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.601.660.913			1 Paket	Rp 3.578.887.750	1 Unit	Rp 3.564.935.118,00	100 %	###	2 Paket	2 Paket	100%
1	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	Rp 20.000.000											
1	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27 Unit	Rp 107.980.000			27 Unit	Rp 19.620.000	1 Unit	Rp 14.720.000,00	75 %	75%	27 Unit	27 Unit	100%
1	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27 Paket	Rp 187.826.000			27 Paket	Rp 237.859.100	1 Unit	Rp 211.815.500,00	89 %	89%	720 Paket	720 Paket	100%
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		34 Sub	Rp 61.497.381.640			12 sub	Rp 17.338.353.010	12 sub	Rp 7.950.352.227	100 %	46%	24 Sub	24 Sub	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun	10435 bumil	Rp 2.073.790.135			10435 bumil	Rp 3.705.036.812	10435 bumil	Rp 1.401.824.600,00	38 %	38%	10365 orang	10365 orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	9961 orang	Rp 293.589.263			9961 orang	Rp 711.440.000	9961 orang	Rp 277.860.175,00	39 %	39%	9894 Orang	9894 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9487 Orang	Rp 209.645.306			9487 Orang	Rp 58.880.300		Rp -	0 %	0%			

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45874 balita	Rp 692.600.715		45874 balita	Rp 65.136.200	45874 balita	Rp 46.366.400	71 %	71%	45765 Balita	45765 Balita	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81469 Anak usia pendidikan dasar	Rp 845.365.034		81469 Anak usia pendidikan dasar	Rp 104.567.090	81469 Anak usia pendidikan dasar	Rp 97.250.950,00	93 %	93%	55358 Anak usia Pendidikan dasar	55358 Anak usia Pendidikan dasar	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	281885 orang	Rp 355.312.721		281885 orang	Rp 58.398.000	281885 orang	Rp 41.431.400	71 %	71%	4837 Orang	4837 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34842 Orang	Rp 511.643.430								21205 Orang	21205 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87733 orang	Rp 75.394.691		87733 orang	Rp 14.880.500	87733 orang	Rp 13.652.500	92 %	92%	86145 Orang	86145 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5068 Orang	Rp 63.891.296		5068 Orang	Rp 23.784.000	5068 Orang	Rp 23.774.000,00	100 %	###	4976 Orang	4976 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	7295 orang	Rp 288.573.217		7295 orang	Rp 26.458.000	7295 orang	Rp 26.438.000,00	100 %	###	954 Orang	954 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7295 orang	Rp 337.675.694		7295 orang	Rp 66.786.535	7295 orang	Rp 44.729.000,00	67 %	67%	11781 Orang	11781 Orang	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11906 Orang	Rp 227.683.990		11906 Orang	Rp 8.253.700	11906 Orang	Rp 8.040.000,00	97 %	97%	11781 Orang	11781 Orang	100%

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100 Dokumen	Rp 2.131.618.011				100 Dokumen	Rp 896.413.300	100 Dokumen	Rp 746.741.244,00	83 %	83%	20 dokumen	20 dokumen	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	91 Dokumen	Rp 20.434.987												
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23 Dokumen	Rp 2.322.762.884				23 Dokumen	Rp 891.740.100		Rp 168.965.000,00	19 %	19%	27 Dokumen	27 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27 Puskesmas	Rp 217.716.614												
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22 Dokumen	Rp 1.467.801.911				22 Dokumen	Rp 653.147.200		Rp 413.108.000,00	63 %	63%	20 dokumen	20 dokumen	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	Rp 708.891.425				3 Dokumen	Rp 364.629.725		Rp 171.932.900,00	47 %	47%	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	Rp 1.000.000												
1	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	27 Puskesmas	Rp 466.839.271				27 Puskesmas	Rp 8.379.971.026		Rp 3.799.498.558,00	45 %	45%	30 Dokumen	30 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12086 Orang	Rp 27.921.040												

1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang terlayani	15%	Rp 174.357.365				Rp 14.666.250	15%	Rp 13.421.300,00	%	92%			
1	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7 Dokumen	Rp 10.068.000											
1	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122 Dokumen	Rp 3.324.020.756				Rp 184.387.472	122 Dokumen	Rp 159.106.000,00	%	86%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai standart	27%	Rp 41.048.333.527											
1	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15 orang	Rp 1.000.000											
1	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	75 spesimen	Rp 89.311.067				Rp 14.633.700	75 spesimen	Rp 2.100.000,00	%	14%	50 Spesimen	50 Spesimen	100%
1	Penyediaan Telemedicine di fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	unit										8 Unit	8 Unit	100%
1	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas sesuai standart	27%	Rp 2.014.928.977											100%

1	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 310.004.574				Rp 122.040.000	1 Dokumen	Rp 121.620.000,00	%	###	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	27 Puskesmas	Rp 963.404.155				Rp 666.905.900	27 Puskesmas	Rp 131.433.000,00	%	20%	8 Puskesmas	8 Puskesmas	100%
1	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal kejadian tidak diharapkan yang terlaksana	100%	Rp 114.621.049											
1	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5 Dokumen	Rp 46.125.535				Rp 45.197.200	5 Dokumen	Rp 33.822.200,00	%	75%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		27 Keluarga	Rp 61.055.000				Rp 261.000.000	27 Keluarga	Rp 207.237.000,00	%	79%	27958 Keluarga	27958 Keluarga	100%
1	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		3 Sub	Rp 803.987.200				Rp 1.211.579.700	3 sub	Rp 1.169.372.726	97 %	97%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 250.873.929				Rp 18.703.000	1 Dokumen	Rp 13.126.800,00	70 %	70%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 287.011.189				Rp 1.000.000.000	1 Unit	Rp 999.818.000,00	100 %	###	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit	Rp 266.102.082				Rp 192.876.700	1 Unit	Rp 156.427.926,00	81 %	81%			

1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		3 Sub	Rp 10.040.000			1 sub	Rp 127.967.800	1 sub	Rp 127.225.000	100 %	99%			100%	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3 Unit	Rp 1.680.000												
1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3 Unit	Rp 3.360.000												
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5 Unit	Rp 5.000.000				Rp 120.000.000	5 Unit	Rp 120.000.000	100 %	###				
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						Rp 7.967.800	1 Unit	Rp 7.225.000,00	91 %	91%				
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	3 Kegiatan	Rp 334.120.000			3 Kegiatan	Rp 241.774.800,00	3 Kegiatan	Rp 232.439.600,00	100 %	96%	1 Sub	1 Sub	100%	
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai dengan standar	1 Sub	Rp 36.146.443			1 sub	Rp 9.620.000	1 sub	Rp 6.930.000	100 %	72%				
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	Rp 36.146.443				Rp 9.620.000	2 Dokumen	Rp 6.930.000,00	100 %	72%				

1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya	4 Sub	Rp 235.473.557			4 sub	Rp 20.772.400	4 sub	Rp 18.985.000	100 %	91%			100%
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 Dokumen	Rp 25.307.816			20 Dokumen	Rp 11.792.900	20 Dokumen	Rp 10.019.000,00	100 %	85%	27 Dokumen	27 Dokumen	100%
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	1 Kegiatan										27 Dokumen	27 Dokumen	100%
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	660 Orang	Rp 186.051.501											
1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	27 Puskesmas	Rp 24.114.240				Rp 8.979.500,00	27 Puskesmas	Rp 8.966.000,00	100 %	###			
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Sub	Rp 62.500.000			1 sub	Rp 211.382.400,00	1 sub	Rp 206.524.600,00	100 %	98%			
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	Rp 62.500.000			5 Dokumen	Rp 211.382.400,00	5 Dokumen	Rp 206.524.600,00	100 %	98%			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya													
1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	5 Kegiatan	Rp 236.702.000			kegiatan	Rp 81.194.394,00	4 Kegiatan	Rp 31.505.400,00	39 %	39%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Yang diterbitkan	3 Sub	Rp 1.480.000			1 sub	Rp 18.343.249	1 sub	Rp 14.746.400	100 %	80%			100%	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Dokumen	Rp 1.020.000												
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20 Sarana	Rp 460.000				Rp 18.343.249,00	20 Sarana	Rp 14.746.400,00	80 %	80%				
		Jumlah Rekomendasi Izin Apotek dan Toko Obat	63Kali													
1	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						1 sub	Rp 9.475.000,00	1 sub	Rp 6.320.000,00	100 %	67%				100%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						12 bulan	Rp 9.475.000,00	12 bulan	Rp 6.320.000,00	100 %	67%	70 Dokumen	70 Dokumen		100%

1	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		1 Sub	Rp 125.470.000										
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	27%	Rp 125.470.000										
1	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		1 Sub	Rp 560.000		1 Kegiatan	Rp 2.707.406	Rp -	Rp -	0 %	0%			
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Rp 560.000			Rp 2.707.406		Rp -	0 %	0%			
1	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		1 Sub	Rp 1.020.000		sub	0	sub	Rp -	0 0%	###			
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker	72 Dokumen	Rp 1.020.000										

		Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
1	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana IRTP yang diperiksa	2 Sub	Rp 108.172.000			1sub	Rp 50.668.739,00	1sub	Rp 10.439.000,00	100 %	21%	1 Sub	1 Sub	100%	
1	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 Unit	Rp 107.152.000				Rp 50.668.739,00	26 Unit	Rp 10.439.000,00	21 %	21%	86 Sarana	86 Sarana	100%	
1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	86 Dokumen	Rp 1.020.000											100%	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan germas		Rp 790.600.580			kegiatan	Rp 124.952.000,00	1 Kegiatan	Rp 116.361.800,00	100 %	93%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang memiliki strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting	1Sub	Rp 215.044.000			1 sub	Rp 124.952.000,00	1 sub	Rp 116.361.800,00	100 %	93%	1 Sub	1 Sub	100%	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	Rp 215.044.000			4 Dokumen	Rp 124.952.000,00	4 Dokumen	Rp 116.361.800,00	100 %	93%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas yang melaksanakan komunikasi antar pribadi di desa lokus	1 Sub	Rp 140.935.420												
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	Rp 140.935.420									2 dokumen	2 dokumen	100%	

1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan minimal 80% posyandu aktif	1 Sub	Rp 434.621.160											
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1 Kegiatan	Rp 434.621.160											
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen												

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan berdasarkan indikator SPM, yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari data capaian Indikator Sasaran / program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Aceh Timur

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100	75,2	81,5	100	100	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	100	75,4	89,2	100	100	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	94,9	88,9	100	100	

4	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100	59,0	75,4	100	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	59,3	67,3	100	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100	32,3	10,5	100	100	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	61,1	72	100	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	100	100	22,6	45	100	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	100	100	100	100	100	70,0	82,7	100	100	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100	59,5	90,6	100	100	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	100	100	100	100	100	100,0	34,5	100	100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100	100	100	100	100	100	8,8	65,3	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Dari evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas kesehatan cukup berhasil karena dari 4 indikator tujuan, 2 indikator kinerja sasaran dan 36 indikator 92,85% sudah dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan ada yang melebihi target. Hal kritis / permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Timur antara lain adalah :

1. Masih adanya kematian ibu, bayi dan balita;
2. Masih ada balita gizi buruk, kurang dan stunting;
3. Masih adanya peningkatan penyakit menular dan tidak menular;

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa hambatan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

- a. Masih banyak desa yang tidak ada bidan Desa, Sehingga tidak terlayani dan tidak tersedianya data
- b. Belum adanya RS mampu PONEK Paripurna.
- c. Sosial budaya masyarakat kurang mendukung terkait pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat mengenai kehamilan dan persalinan yang aman.
- d. Peran Lintas Sektor & Lintas program belum optimal
- e. Kurangnya sarana NICU di Fasilitas kesehatan rujukan.
- f. Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif
- g. Masih ada ibu hamil yang belum memahami arti pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, beberapa ibu hamil memeriksakan kehamilan setelah usia kehamilan trimester 2 ke atas, ada juga ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan sehingga tidak termonitor kesehatannya sehingga memungkinkan timbulnya resiko saat melahirkan.
- h. Tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi memungkinkan adanya pendatang yang dalam kondisi kehamilan resiko tinggi dan balita gizi buruk. Faktor- faktor ini dimungkinkan menjadi salah satu faktor penyumbang angka kematian ibu melahirkan maupun jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Aceh Timur.
- i. Pemantauan status gizi cukup sulit karena beberapa orang tua / keluarga tidak membawa anaknya yang kurus ke posyandu / puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak terpantau oleh kader pendamping balita gizi kurang dan buruk maupun oleh tenaga kesehatan.
- j. Sistem Informasi Kesehatan belum dapat berjalan sebagai mana mestinya.

Dinas kesehatan juga mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi, dalam pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas.
- b. Regulasi dibidang pengobatan alternatif masih lemah
- c. Penerapan peraturan periklanan pengobatan alternatif diberbagai media

- d. Merebaknya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan
- e. Adanya penolakan imunisasi
- f. Pola asuh orang tua terhadap asupan gizi anak yang belum baik.

Sedangkan peluang dalam peningkatan pelayanan kesehatan diantaranya adalah :

- a. Banyaknya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Aceh Timur, baik didalam maupun diluar Kabupaten Aceh Timur
- b. Diberlakukannya UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran Adanya dana / anggaran dari Pusat untuk beberapa program kesehatan Berdasarkan analisis, kajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, makadapat dirumuskan beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan antara lain:
 - 1. Mengupayakan tetap menjaga mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - 2. Melaksanakan percepatan dalam mencapai target SDG's dan SPM-Kesehatan yang belum sepenuhnya tercapai;
 - 3. Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan desa/kelurahan siaga aktif dan cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat;
 - 4. Mengoptimalkan Penggunaan sistem informasi Kesehatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2023 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPK tahun 2023-2026, SDG's dan SPM-Kesehatan. Program dan kegiatan Tahun 2023 sudah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 sehingga terdapat Perbedaan Nomenkaltur dengan Tahun sebelumnya. Tidak ada Perbendaaan jumlah anggaran rancangan awal RKPD dengan Hasil analisis kebutuhan yang direncanakan. Secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Aceh Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	7	9	7	8	9	10	11	12	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp289.267.415.845	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp289.267.415.845		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp289.267.415.845	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp289.267.415.845		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	9	Kegiatan	Rp200.329.860.910	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	9	Kegiatan	Rp200.329.860.910	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	7	sub	Rp26.831.480	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	7	sub	Rp26.831.480	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 12.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	Rp 12.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1.680.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 1.680.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 8.971.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	Rp 8.971.480	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	Rp 2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	Rp 2.000.000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	sub	Rp124.642.525.362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	sub	Rp124.642.525.362	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1691	Ora/bulan	Rp 124.628.945.362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1691	Ora/bulan	Rp 124.628.945.362	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Rp 3.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	Rp 3.600.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	Rp 500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	Rp 500.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen	Rp 560.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	Rp 6.060.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	Rp 6.060.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	Rp 300.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen	Rp 300.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	Rp 2.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Laporan	Rp 2.560.000	
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Sub	Rp3.980.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5	Sub	Rp3.980.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Kegiatan	Rp 1.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Kegiatan	Rp 1.000.000	

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	30	Pegawai/ASN	Rp 560.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	30	Pegawai/ASN	Rp 560.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kegiatan	Rp 560.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kegiatan	Rp 560.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kegiatan	Rp 560.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Kegiatan	Rp 560.000	

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	162	Pegawai / ASN	Rp 1.300.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	162	Pegawai / ASN	Rp 1.300.000	
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Sub	Rp49.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Sub	Rp49.400.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	Rp 6.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	Rp 6.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1654	Dokumen	Rp 7.380.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1654	Dokumen	Rp 7.380.000	

	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 7.560.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	Rp 7.560.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27	Dokumen	Rp 7.560.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27	Dokumen	Rp 7.560.000	
	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	15	orang	Rp 7.500.000	Pemindahan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	15	orang	Rp 7.500.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54	orang	Rp 5.840.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	54	orang	Rp 5.840.000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	orang	Rp 7.560.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	orang	Rp 7.560.000	
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	9	Sub	Rp1.519.582.653	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	9	Sub	Rp1.519.582.653	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Paket	Rp 57.545.173	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Paket	Rp 57.545.173	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	Rp 78.239.380	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	Paket	Rp 78.239.380	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Rp 55.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Rp 55.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 679.840.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 679.840.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 325.758.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 325.758.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	Rp 15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	Rp 15.000.000	

	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	Rp 1.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	Rp 1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41	41 Laporan	Rp 306.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41	41 Laporan	Rp 306.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Rp 1.200.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Rp 1.200.000	
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Sub	Rp4.642.161.952	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Sub	Rp4.642.161.952	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Rp 1.163.167.960	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	Rp 1.163.167.960	
	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	Rp 110.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	Rp 110.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	Rp 250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	Rp 250.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 1.300.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp 1.300.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit/Tahun	Rp 1.818.993.992	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit/Tahun	Rp 1.818.993.992	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4	Sub	Rp 15.377.934.413	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4	Sub	Rp 15.377.934.413	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Rp 8.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 2.602.372.013	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 2.602.372.013	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 12.762.562.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 12.762.562.400	
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	6	Sub	Rp2.079.445.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	6	Sub	Rp2.079.445.050	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	Rp 12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	Unit	Rp 12.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	Unit	Rp 795.424.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64	Unit	Rp 795.424.050	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Rp 35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	Rp 35.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 141.851.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 141.851.400	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	Rp 1.085.169.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	Unit	Rp 1.085.169.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp 10.000.000	
i	Peningkatan Pelayanan BLUD			1	Sub	Rp 51.988.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD			1	Sub	Rp 51.988.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	unit kerja	Rp 51.988.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	unit kerja	Rp 51.988.000.000	

2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minima (SPM) Bidang Kesehatan	4	Kegiatan	Rp87.576.132.355	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minima (SPM) Bidang Kesehatan	4	Kegiatan	Rp87.576.132.355	
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14	Sub	Rp25.264.723.515	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14	Sub	Rp25.264.723.515	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 852.587.731	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 852.587.731	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	Unit	Rp 300.000.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	1	Unit	Rp 300.000.000	

	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	80	Unit	Rp 1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	80	Unit	Rp 1.000.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	Unit	Rp 378.852.766	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	Unit	Rp 378.852.766	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Unit	Rp 694.540.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Unit	Rp 694.540.500	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	Unit	Rp 141.813.934	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	Unit	Rp 141.813.934	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	Unit	Rp 4.244.477.209	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	Unit	Rp 4.244.477.209	

	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	set	Rp 4.120.399.682	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10	set	Rp 4.120.399.682	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	600	Unit	Rp 100.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	600	Unit	Rp 100.000.000	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	Paket	Rp 8.514.584.780	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1	Paket	Rp 8.514.584.780	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	Paket	Rp 4.601.660.913	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	Paket	Rp 4.601.660.913	

	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1	Unit	Rp 20.000.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1	Unit	Rp 20.000.000	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27	Unit	Rp 107.980.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27	Unit	Rp 107.980.000	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27	Paket	Rp 187.826.000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	27	Paket	Rp 187.826.000	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase balita gizi buruk; Cakupan gizi buruk yang mendapatkan perawatan;	35	Sub	Rp61.497.381.640	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase balita gizi buruk; Cakupan gizi buruk yang mendapatkan perawatan;	35	Sub	Rp61.497.381.640	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10435	Orang	Rp 2.073.790.135	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10435	Orang	Rp 2.073.790.135	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9961	Orang	Rp 293.589.263	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9961	Orang	Rp 293.589.263	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9487	Orang	Rp 209.645.306	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9487	Orang	Rp 209.645.306	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45874	Orang	Rp 692.600.715	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45874	Orang	Rp 692.600.715	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81469	Orang	Rp 845.365.034	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81469	Orang	Rp 845.365.034	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	281885	Orang	Rp 355.312.721	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	281885	Orang	Rp 355.312.721	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34842	Orang	Rp 511.643.430	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34842	Orang	Rp 511.643.430	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87733	Orang	Rp 75.394.691	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87733	Orang	Rp 75.394.691	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5068	Orang	Rp 63.891.296	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5068	Orang	Rp 63.891.296	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	954	Orang	Rp 288.573.217	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	954	Orang	Rp 288.573.217	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7295	Orang	Rp 337.675.694	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7295	Orang	Rp 337.675.694	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11906	Orang	Rp 227.683.990	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11906	Orang	Rp 227.683.990	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	Dokumen	Rp 2.131.618.011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	Dokumen	Rp 2.131.618.011	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	91	Dokumen	Rp 20.434.987	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	91	Dokumen	Rp 20.434.987	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23	Dokumen	Rp 2.322.762.884	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23	Dokumen	Rp 2.322.762.884	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27	Puskesmas	Rp 217.716.614	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	27	Puskesmas	Rp 217.716.614	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22	Dokumen	Rp 1.467.801.911	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	22	Dokumen	Rp 1.467.801.911	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	Dokumen	Rp 708.891.425	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	Dokumen	Rp 708.891.425	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	Dokumen	Rp 1.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2	Dokumen	Rp 1.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 466.839.271	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 466.839.271	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12086	Orang	Rp 27.921.040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12086	Orang	Rp 27.921.040	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15	%	Rp 174.357.365	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	15	%	Rp 174.357.365	

	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7	Dokumen	Rp 10.068.000	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	7	Dokumen	Rp 10.068.000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122	Dokumen	Rp 3.324.020.756	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122	Dokumen	Rp 3.324.020.756	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27	%	Rp 41.048.333.527	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27	%	Rp 41.048.333.527	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15	Orang	Rp 1.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	15	Orang	Rp 1.000.000	

	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	75	Paket	Rp 89.311.067	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	75	Paket	Rp 89.311.067	
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27	%	Rp 2.014.928.977	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27	%	Rp 2.014.928.977	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	Rp 310.004.574	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Dokumen	Rp 310.004.574	

	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	27	Unit	Rp 963.404.155	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	27	Unit	Rp 963.404.155	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Rp 114.621.049	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Rp 114.621.049	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5	Dokumen	Rp 46.125.535	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	5	Dokumen	Rp 46.125.535	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	27	Keluarga	Rp 61.055.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	27	Keluarga	Rp 61.055.000	
c	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Sub	Rp803.987.200	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3	Sub	Rp803.987.200	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 250.873.929	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 250.873.929	

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen	Rp 287.011.189	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2	Dokumen	Rp 287.011.189	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1	Paket	Rp 266.102.082	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1	Paket	Rp 266.102.082	
d	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah sakit terakreditasi	3	Sub	Rp 10.040.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah sakit terakreditasi	3	Sub	Rp 10.040.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3	Unit	Rp 1.680.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	3	Unit	Rp 1.680.000	

	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3	Unit	Rp 3.360.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3	Unit	Rp 3.360.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5	Unit	Rp 5.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	5	Unit	Rp 5.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	3	Sub	Rp 334.120.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	3	Sub	Rp 334.120.000	
a	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai dengan standar	1	Sub	Rp36.146.443	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai dengan standar	1	Sub	Rp36.146.443	

			Persentase Puskesmas Tanpa Dokter						Persentase Puskesmas Tanpa Dokter				
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	Dokumen	Rp 36.146.443	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	Dokumen	Rp 36.146.443	
b	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya	3	Sub	Rp 235.473.557	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Kesehatan yang di tingkatkan kompetensinya	3	Sub	Rp 235.473.557	

	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20	Dokumen	Rp 25.307.816	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20	Dokumen	Rp 25.307.816	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	Kegiatan	Rp 186.051.501	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1	Kegiatan	Rp 186.051.501	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 24.114.240	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 24.114.240	
c	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	Rp 62.500.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	Rp 62.500.000	

	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 62.500.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	27	Puskesmas	Rp 62.500.000	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	Orang				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0	Orang		
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	5	Kegiatan	Rp236.702.000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	5	Kegiatan	Rp236.702.000	
a	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Izin Yang diterbitkan	2	Sub	Rp1.480.000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Izin Yang diterbitkan			Rp1.480.000	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	Dokumen	Rp 1.020.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5	Dokumen	Rp 1.020.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	Sarana	Rp 460.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20	Sarana	Rp 460.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				
b	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Izin Yang diterbitkan			Rp-	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Izin Yang diterbitkan			Rp-	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
c	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Izin Yang diterbitkan	1	Sub	Rp125.470.000	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Izin Yang diterbitkan	1	Sub	Rp125.470.000	

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	Rp 125.470.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70	Dokumen	Rp 125.470.000	
d	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat sertifikasi Sertifikat Laik Higiene	1	Sub	Rp560.000	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapat sertifikasi Sertifikat Laik Higiene	1	Sub	Rp560.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	Dokumen	Rp 560.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	Dokumen	Rp 560.000	

e	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Sub	Rp 1.020.000	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	Sub	Rp 1.020.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72	Dokumen	Rp 1.020.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	72	Dokumen	Rp 1.020.000	
f	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Sarana IRTP yang diperiksa	2	Sub	Rp 108.172.000	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Jumlah Sarana IRTP yang diperiksa	2	Sub	Rp 108.172.000	
	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26	Unit	Rp 107.152.000	Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan <i>Post Market</i> dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26	Unit	Rp 107.152.000	

	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	86	Dokumen	Rp 1.020.000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	86	Dokumen	Rp 1.020.000	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	3	Kegiatan	Rp 790.600.580	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase kecamatan yang menerapkan kebijakan germas	3	Kegiatan	Rp 790.600.580	
a	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang memiliki strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting	1	Sub	Rp215.044.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kecamatan yang memiliki strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan penurunan stunting	1	Sub	Rp215.044.000	
			Jumlah petugas kesehatan yang dilatih/diorentasi komunikasi antar pribadi (bidan, perawat, gizi, Promkes, Sanitasi, Kader)						Jumlah petugas kesehatan yang dilatih/diorentasi komunikasi antar pribadi (bidan, perawat, gizi, Promkes, Sanitasi, Kader)				

	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	Rp 215.044.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	Dokumen	Rp 215.044.000	
b	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Puskesmas yang melaksanakan komunikasi antar pribadi di desa lokus	1	Sub	Rp 140.935.420	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Puskesmas yang melaksanakan komunikasi antar pribadi di desa lokus	1	Sub	Rp 140.935.420	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	Dokumen	Rp 140.935.420	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	Dokumen	Rp 140.935.420	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				

c	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kecamatan dengan minimal 80% posyandu aktif	1	Sub	Rp434.621.160	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kecamatan dengan minimal 80% posyandu aktif	1	Sub	Rp434.621.160	
			Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif						Kecamatan yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif				
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Kegiatan	Rp 434.621.160	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Kegiatan	Rp 434.621.160	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat telah dirangkum dari hasil musrenbang kecamatan tahun 2020. Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebagian besar usulan dari masyarakat untuk pembangunan bidang kesehatan telah dilimpahkan ke SKPD Kecamatan, hal ini sesuai Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah. Namun demikian kegiatan yang belum difasilitasi oleh Kecamatan, akan diampu oleh Puskesmas setempat kecuali kegiatan yang berorientasi pengadaan sarana /barang.

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui musrenbang kecamatan antara lain penyuluhan kesehatan keluarga, pemberian PMT pada Balita dan Lansia, Penyuluhan dan Pemeriksaan kualitas air, pelatihan kader kesehatan dan kader Posyandu, Sosialisasi dan penyuluhan kesehatan Lingkungan dan PHBS, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaksanaan Posbindu, Penyuluhan bahaya Rokok dan Narkoba, Deklarasi Kawasan tanpa asap Rokok, Penyuluhan kesehatan Reproduksi. Pencegahan Penyakit DBD, Pemberian PMT pada ibu hamil dan balita dengan masalah Gizi, Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Sosialisasi dan Pembentukan KP Ibu, Penyuluhan kesehatan penyakit menular maupun tidak menular, penyuluhan kesehatan lansia. Program dan kegiatan yang diusulkan oleh DPRD melalui Pokok Pikiran DPRD adalah Sunat Massal di Kabupaten Aceh Timur untuk anak-anak yang kurang mampu, usulan tersebut sudah diakomodir dengan menganggarkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan rangkuman usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut, bahwa seluruhnya telah secara rutin dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui kegiatan Pengelolaan upaya Kesehatan Masyarakat yang ada di Puskesmas. Untuk teknis pelaksanaan pada tahun 2021 diperlukan adanya koordinasi yang intensif antara tokoh masyarakat dengan petugas kesehatan diPuskesmas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

a. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya Kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome). dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah ;

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 230 per 100.00 kelahiran hid up menjadi 183 per 100.000 kelahiran hid up (RPJMN).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 20 menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.

Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maka ukuran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan Kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

b. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat

2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia serta tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan tersebut terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tujuan dan Sasaran yang sama dalam kurun waktu Empat tahun kedepan yaitu permasalahan kesehatan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Kesehatan terdapat kesamaan yaitu Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi. AKI di Kabupaten Aceh Timur merujuk pada AKI Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 belum mencapai target MDG's namun sudah lebih rendah dari target angka Nasional. Keberhasilan kinerja dalam penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Aceh Timur memberi kontribusi keberhasilan penurunan AKI dan AKB di tingkat nasional. Mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur yang cukup besar (427.032 jiwa, BPS Kabupaten Aceh Timur 2021) berpotensi terhadap penambahan jumlah kematian ibu. Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan infeksi penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol. Peningkatan penyakit menular juga berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian. Target cakupan imunisasi yang belum tercapai perlu peningkatan upaya preventif dan promotif seiring dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

B. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Aceh

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Aceh

Hasil evaluasi RPJM Aceh Tahun 2017-2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan kembali dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) untuk periode Tahun 2023-2026. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Kesehatan Aceh merujuk kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan dengan Indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia.

1. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Aceh

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Aceh adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan.

Adapun Indikator untuk dari sasaran 1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu;

1. Angka usia harapan Hidup
2. Prevalensi Stunting
3. Angka Kematian Bayi (AKB)/ per 1.000 KH)
4. Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 KH)

Indikator untuk dari sasaran Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yaitu Persentase Rumah Sakit Yang Regional.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Aceh tersebut terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tujuan dan Sasaran yang sama dalam kurun waktu Empat tahun kedepan yaitu Angka usia harapan Hidup, Prevalensi Stunting, Angka Kematian Bayi (AKB)/ per 1.000 KH), Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 KH).

C. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur

Hasil evaluasi RPJM Kabupaten Tahun 2017 – 2022 memberikan informasi beberapa indikator tujuan dan sasaran yang sudah dilaksanakan perlu menjadi perhatian untuk dilanjutkan Kembali dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Timur untuk periode Tahun 2023-2026 dengan tujuan **Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk** dengan indikator tujuan adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**. Adapun Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur 2023-2026 adalah **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat** dengan indikator tujuan adalah **Umur Harapan Hidup (UHH)**. Tujuan Renja Mengacu Pada Resntra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

4.1. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Aceh Timur

Untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di atas maka sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur adalah:

1. Meningkatnya Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dan Kompetensi sesuai standar
2. Meningkatnya Akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Meningkatnya Kemandirian masyarakat
4. Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5. Meningkatnya perbaikan reformasi birokrasi

Tujuan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Mengacu Pada Resntra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026

Secara detail tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur beserta indikator kinerja disajikan dalam table 4.1 berikut ini;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun
		Meningkatnya kualitas pembangunan manusia dan derajat kesehatan masyarakat	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 Penduduk
		Meningkatnya Akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%
		Meningkatnya Kemandirian masyarakat	Ratio Posyandu Persatuan Balita	Per 1000 balita
			Prevalensi Stunting	%
		Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000 KH
			Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH
		Meningkatnya perbaikan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
			Nilai SAKIP	Indeks

- b. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur harus mendorong capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.

Layanan SPM tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN		TARGET 2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Setiap Ibu Bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	3	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	4	Setiap bayi baru lahir Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	6	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 - 59 th mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan pada usia lanjut	7	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	8	Setiap Penderita Hipertensi mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai Standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	9	Setiap Penderita Deabetes melitus mendapatakan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	Setiap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	11	Setiap Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	12	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs sesuai standar	100%

c. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan merumuskan 5 (lima) program dan 22 (Dua puluh dua) kegiatan. Secara rinci Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Pemindahan Tugas ASN
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Peningkatan Pelayanan BLUD
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengembangan Rumah Sakit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
		Pengadaan Obat Vaksin
		Pengadaan Bahan Habis Pakai
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
		Operasional Pelayanan Puskesmas
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
		Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas kesehatan Kabupaten Aceh Timur untuk tahun 2023 sebesar Rp **144.075.223.606,-** ,secara rinci rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 termuat dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 dan perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Aceh Timur

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp289.267.415.845				289.222.441.195
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		100 %	Rp200.329.860.910			100 %	200.923.586.765
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		7 Sub	26.831.480			7 Sub	28.101.480

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	2	Dokumen	Rp 12.500.000	APBK		2	Dokumen	Rp 13.260.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 1.680.000			1	Dokumen	Rp 1.680.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Dokumen	Rp 560.000	APBK		1	Dokumen	Rp 560.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Dokumen	Rp 560.000	APBK		1	Dokumen	Rp 560.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 560.000			1	Dokumen	Rp 560.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Laporan	Rp 8.971.480	APBK		1	Laporan	Rp 9.471.480
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	Rp 2.000.000	APBK		1	Laporan	2.010.000

b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7	Sub	124.642.525.362			7	Sub	124.912.447.470
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1691	Orang/bulan	Rp 124.628.945.362	APBK		1691	Orang/bulan	Rp 124.898.342.470
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 3.600.000			1	Dokumen	Rp 3.600.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 500.000	APBK		1	Dokumen	Rp 500.000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Dokumen	Rp 560.000	APBK, DAK FISIK		1	Dokumen	Rp 560.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	Laporan	Rp 6.060.000	APBK		5	Laporan	Rp 6.565.000
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh	1	Dokumen	Rp 300.000	APBK		1	Dokumen	Rp 300.000

7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	2	Laporan	Rp 2.560.000	APBK	2	Laporan	Rp 2.580.000
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Sub	5	Sub	3.980.000		5	Sub	4.006.000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Dokumen	Rp 1.000.000	APBK	1	Dokumen	Rp 1.000.000
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	2	Laporan	Rp 560.000		2	Laporan	Rp 560.000
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	2	Laporan	Rp 560.000	DAK FISIK	2	Laporan	Rp 560.000
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	2	Laporan	Rp 560.000		2	Laporan	Rp 560.000
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan Kab. Aceh	1	Dokumen	Rp 1.300.000	APBK	1	Dokumen	Rp 1.326.000

			Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe								
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Sub	7	Sub	49.400.000			7	Sub	49.772.600
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Unit	Rp 6.000.000	APBK		1	Unit	Rp 6.000.000
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1654	Dokumen	Rp 7.380.000	APBK		1654	Dokumen	Rp 7.601.400
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 7.560.000	OTSUS		1	Dokumen	Rp 7.560.000
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27	Dokumen	Rp 7.560.000	APBK		27	Dokumen	Rp 7.560.000
8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	15	Orang	Rp 7.500.000			15	Orang	Rp 7.500.000

10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	54	Orang	Rp 5.840.000			54	Orang	Rp 5.840.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Aceh Timur, Darul Ihsan, Keude Dua Kab. Aceh Timur, Peunaron, Peunaron Baru	54	Orang	Rp 7.560.000	DAK FISIK		54	Orang	Rp 7.711.200
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat Daerah	9 Sub	9	Sub	1.519.582.653			9	Sub	1.531.427.396
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Timur, Semua Kelurahan	28	Paket	Rp 57.545.173	DBH-CHT		28	Paket	Rp 57.985.173
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	28	Paket	Rp 78.239.380	DBH-CHT, DAK FISIK		28	Paket	Rp 78.559.380
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Paket	Rp 55.000.000	DAK NON FISIK		1	Paket	Rp 56.500.000

4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Paket	Rp 679.840.000	DAK FISIK, OTSUS	1	Paket	Rp 684.600.743
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Paket	Rp 325.758.100	DAK FISIK	1	Paket	Rp 328.783.100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Dokumen	Rp 15.000.000	APBK	2	Dokumen	Rp 15.133.000
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Paket	Rp 1.000.000		1	Paket	Rp 1.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	41	Laporan	Rp 306.000.000	APBK, DAK NON FISIK	41	Laporan	Rp 307.616.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Dokumen	Rp 1.200.000	DAK NON FISIK	1	Dokumen	Rp 1.250.000
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Sub	5	Sub	4.642.161.952		5	Sub	3.675.276.010

2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1 Unit	Rp 1.163.167.960	DAK NON FISIK		1 Unit	Rp 1.340.019.360
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp 110.000.000	APBK, DAK NON FISIK		5 Unit	Rp 215.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	10 Unit	250.000.000	APBK, DAK NON FISIK		10 Unit	Rp 100.000.000
8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1 Unit	1.300.000.000	APBK, DAK NON FISIK		1 Unit	Rp -
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit/tahun	1.818.993.992	DAK NON FISIK		4 Unit/tahun	Rp 1.820.256.650
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	-	DAK NON FISIK		2 Unit	Rp 200.000.000
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	4 Sub	4 Sub	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Sub	15.501.014.524

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	Rp 8.000.000	DAK NON FISIK		1	Laporan	Rp 8.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	Rp 2.602.372.013	DAK NON FISIK		1	Laporan	Rp 2.622.293.564
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Laporan	Rp 5.000.000	DAK NON FISIK		1	Laporan	Rp 5.150.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1	Laporan	Rp 12.762.562.400	APBK, DAK NON FISIK		1	Laporan	Rp 12.865.570.960
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan baik	6 Sub	6	Sub	2.079.445.050			6	Sub	2.091.673.285
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	6	Unit	Rp 12.000.000	DAK NON FISIK, EHRA		6	Unit	Rp 12.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	64	Unit	Rp 795.424.050	DAK NON FISIK		64	Unit	Rp 802.509.715

6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Unit	Rp 35.000.000	DAK NON FISIK	1	Unit	Rp 36.750.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Unit	Rp 141.851.400	DAK NON FISIK	1	Unit	Rp 144.943.970
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	Unit	Rp 1.085.169.600	APBK, DAK NON FISIK	30	Unit	Rp 1.085.169.600
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rp 10.000.000	DAK NON FISIK			Rp 10.300.000
	Peningkatan Pelayanan BLUD		1 Sub	1	Sub	-		1	Sub	53.129.868.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan rumah sakit	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Unit kerja			1	Unit kerja	Rp 53.129.868.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minima (SPM) Bidang Kesehatan		4	Kegiatan	87.576.132.355		4	Kegiatan	86.923.431.850

a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	14 Sub	14	Sub	25.264.723.515			14	Sub	24.405.014.969
3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	Unit	Rp 852.587.731	DAK NON FISIK		1	Unit	Rp 527.134.478
5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Unit	Rp 300.000.000			1	Unit	Rp 303.300.000
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	80	Unit	Rp 1.000.000.000	APBK		80	Unit	Rp 1.011.000.000
9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	2	Unit	Rp 378.852.766	APBK, DID		2	Unit	Rp 377.190.217
10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	Unit	Rp 694.540.500	APBK		2	Unit	Rp 746.047.990

12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	141.813.934	APBK		2 Unit	Rp 142.297.735
13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	2 Unit	Rp 4.244.477.209	APBK		2 Unit	Rp 3.215.000.000
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 Unit	4.120.399.682	APBK		0 Unit	Rp 4.510.239.618
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Unit	Rp 100.000.000	DAK BPOM		600 Unit	Rp 110.000.000
16	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	Rp 8.514.584.780	APBK		1 Paket	Rp 8.529.051.157
17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	1 Paket	4.601.660.913	DAK NON FISIK		1 Paket	Rp 4.611.660.913
18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1 Unit	Rp 20.000.000	APBK, DAK BPOM		1 Unit	Rp 24.347.731

20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27 Unit	Rp 107.980.000			27 Unit	Rp 108.980.000
21	Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Semua Kelurahan	27 Paket	Rp 187.826.000	APBK, DAK NON FISIK, DAK BPOM		27 Paket	Rp 188.765.130
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				33 Sub	Rp 61.497.381.640			33 Sub	61.498.232.251
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	10435 Orang	Rp 2.073.790.135			10435 Orang	Rp 2.088.270.045
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	9961 Orang	293.589.263			9961 Orang	Rp 293.574.329
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	9487 Orang	209.645.306			9487 Orang	Rp 211.064.093
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	45874 orang	Rp 692.600.715			45874 orang	Rp 693.048.509

5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	81469	Orang	Rp 845.365.034			81469	Orang	Rp 851.133.915
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	281885	orang	Rp 355.312.721			281885	orang	Rp 357.722.048
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	34842	Orang	Rp 511.643.430			34842	Orang	Rp 495.052.846
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	87733	orang	Rp 75.394.691			87733	orang	Rp 55.878.414
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	5068	Orang	Rp 63.891.296			5068	Orang	Rp 44.296.797
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	954	orang	Rp 288.573.217			954	orang	Rp 290.542.313
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	7295	orang	Rp 337.675.694			7295	orang	Rp 339.923.964

12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	11906	Orang	Rp 227.683.990			11906	Orang	Rp 229.164.239
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	100	Dokumen	Rp 2.131.618.011			100	Dokumen	Rp 2.146.750.046
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	91	Dokumen	20.434.987			91	Dokumen	Rp 20.519.545
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	23	Dokumen	2.322.762.884			23	Dokumen	Rp 2.337.686.875
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27	Puskesmas	Rp 217.716.614			27	Puskesmas	Rp 203.020.284
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	22	Dokumen	Rp 1.467.801.911			22	Dokumen	Rp 1.478.041.365
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	3	Dokumen	708.891.425			3	Dokumen	Rp 713.677.885

19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	2	Dokumen	Rp 1.000.000			2	Dokumen	Rp 1.000.000
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27	Puskesmas	466.839.271			27	Puskesmas	Rp 469.918.576
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	12086	Orang	27.921.040			12086	Orang	28.049.703
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang terlayani	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	15	%	174.357.365			15	%	175.549.796
24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	7	Dokumen	Rp 10.068.000			7	Dokumen	Rp 10.136.462
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	122	Dokumen	3.324.020.756			122	Dokumen	Rp 3.348.288.635
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai standart	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27	%	41.048.333.527			27	%	41.327.462.194

27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	15	orang	Rp 1.000.000			15	orang	Rp 1.000.000
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	75	Paket	Rp 89.311.067			75	Paket	Rp 89.906.958
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Terlaksananya Manajemen Puskesmas sesuai standart	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27	%	2.014.928.977			27	%	2.028.630.491
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Dokumen	Rp 310.004.574			1	Dokumen	Rp 312.112.606
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	27	Unit	Rp 963.404.155			27	Unit	Rp 633.861.185
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah investigasi awal kejadian tidak diharapkan yang terlaksana	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	100	%	114.621.049			100	%	115.398.670
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	5	Dokumen	Rp 46.125.535			5	Dokumen	Rp 46.439.189

39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	27	Keluarga	Rp 61.055.000			27	Keluarga	Rp 61.110.275
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			3	Sub	803.987.200			3	Sub	Rp 1.010.144.630
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Dokumen	250.873.929			1	Dokumen	Rp 252.128.300
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Dokumen	287.011.189			1	Dokumen	Rp 539.695.145
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Unit	Rp 266.102.082			1	Unit	Rp 218.321.185
5	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3	Sub	Rp 10.040.000			3	Sub	Rp 10.040.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	3	Unit	Rp 1.680.000			3	Unit	Rp 1.680.000

2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	3	Unit	Rp 3.360.000			3	Unit	Rp 3.360.000
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	5	Unit	Rp 5.000.000			5	Unit	Rp 5.000.000
c	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3	Kegiatan	334.120.000			3	Kegiatan	Rp 358.120.000
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			1	Sub	36.146.443			1	Sub	Rp 45.841.224
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	2	Dokumen	36.146.443			2	Dokumen	Rp 45.841.224
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			3	Sub	Rp 235.473.557			3	Sub	Rp 225.778.776
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	20	Dokumen	Rp 25.307.816			20	Dokumen	Rp 25.496.909

2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	1	Kegiatan	186.051.501		1	Kegiatan	Rp 175.252.610
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	27	Puskesmas	24.114.240		27	Puskesmas	Rp 25.029.257
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	62.500.000		1	Sub	Rp 86.500.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	5	Dokumen	62.500.000		5	Dokumen	Rp 86.500.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			5	Kegiatan	Rp 236.702.000		5	Kegiatan	Rp 226.702.000
	Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			2	Sub	Rp 1.480.000		2	Sub	Rp 1.480.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	5	Dokumen	Rp 1.020.000		5	Dokumen	Rp 1.020.000

		Tradisional (UMOT)									
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	20	Sarana	Rp	460.000		20	Sarana	Rp 460.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			1	Sub	Rp	125.470.000		1	Sub	Rp 125.470.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	70	Dokumen	Rp	125.470.000		70	Dokumen	Rp 125.470.000
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			1	Sub	Rp	560.000		1	Sub	Rp 560.000

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	2	Dokumen	Rp 560.000			2	Dokumen	Rp 560.000
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			1	Sub	Rp 1.020.000			1	Sub	Rp 1.020.000
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	72	Dokumen	Rp 1.020.000			72	Dokumen	Rp 1.020.000
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			2	Sub	Rp 108.172.000			2	Sub	Rp 98.172.000
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	26	Unit	Rp 107.152.000			26	Unit	Rp 97.152.000
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanah Anoe	86	Dokumen	Rp 1.020.000			86	Dokumen	Rp 1.020.000

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3	Kegiatan	Rp 790.600.580			3	Kegiatan	Rp 790.600.580
	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	Rp 215.044.000			1	Sub	Rp 215.044.000
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	4	Dokumen	Rp 215.044.000			4	Dokumen	Rp 215.044.000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	Rp 140.935.420			1	Sub	Rp 140.935.420
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	3	Dokumen	Rp 140.935.420			3	Dokumen	Rp 140.935.420
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	Sub	Rp 434.621.160			1	Sub	Rp 434.621.160
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Kab. Aceh Timur, Idi Rayeuk, Tanoh Anoe	1	Kegiatan	Rp 434.621.160			1	Kegiatan	Rp 434.621.160

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2023 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan.

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang Sehat dan Mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif, efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai.

Pada akhir tahun anggaran 2023 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Idi, September 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ACEH TIMUR



SAHMINAN, SKM, M. Kes
NIP. 19710416 199303 1 002